

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

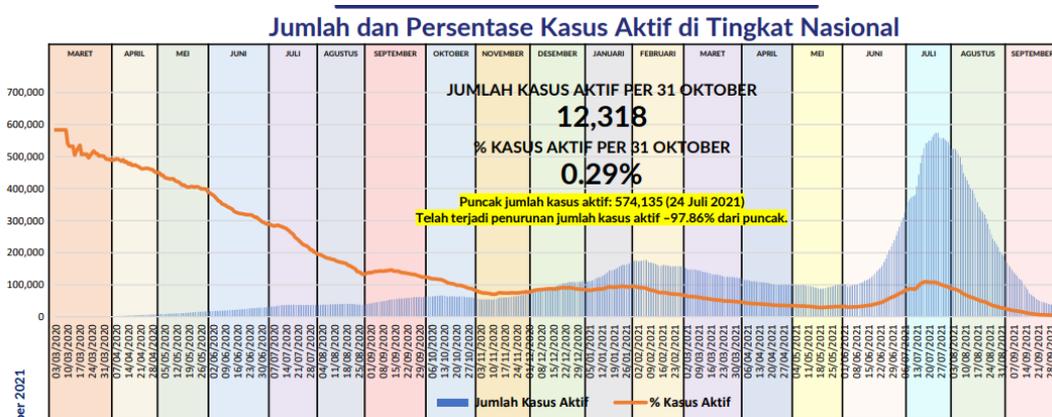
### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi hampir 2 tahun berjalan ini, menjadi titik berat bagi Indonesia dalam menangani masalah pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Dalam permasalahan pandemi Covid-19 ini menimbulkan berbagai masalah dan dampak dari berbagai sisi kehidupan, salah satu yang paling mempengaruhi yaitu dibidang sosial, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi yang telah berskala global ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan contohnya seperti perundang-undangan dan peraturan seperti PSBB dimasa awal pandemi Covid-19 yang dilakukan di bulan April 2020. Diberlakukan PSBB sebenarnya tidak benar-benar mengurangi dampak namun malah membuat segi ekonomi masyarakat menurun. Selama pemberlakuan PSBB transisi yang terjadi di tengah-tengah membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk, kini malah meningkat kembali kasus penulaaran Covid-19 yang begitu cepat dan terus menerus di bulan Juni 2021, yang mengharuskan pemerintah mengambil keputusan dan tindakan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai diberlakukan pada tanggal 3-20 Juni 2021 dan berlanjut hingga Agustus 2021. Setelah mendapat banyak masukan dari para menteri dan para ahli kesehatan masyarakat, dan menimbang lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat mengharuskan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, dengan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali (Kompas 2021). Kebijakan Penerapan PPKM Darurat yang diambil tersebut untuk mengendalikan laju Covid-19, serta membatasi mobilitas masyarakat dan kegiatan-

kegiatan aktivitas diluar dengan target menurunkan angka penularan 50% (Detik 2021). Namun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung proses PPKM Darurat dilakukan, perlu adanya proses *testing* dan *tracing* yang harus ditingkatkan, begitu juga dengan vaksinasi yang harus dilakukan secepat mungkin untuk mencapai *herd immunity*, dan dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat negara yang memberikan contoh yang baik, bukan yang bertolak belakang dengan protokol kesehatan.

**Gambar 1. 1**

**Jumlah dan Persentase Kasus Aktif di Tingkat Nasional**



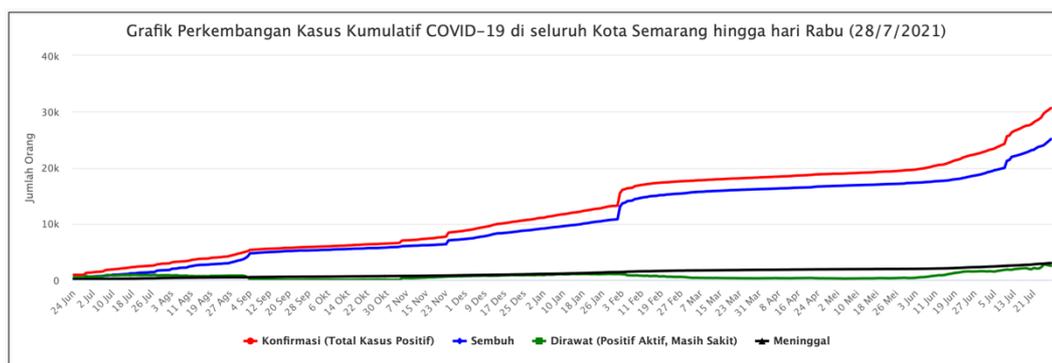
Sumber: *Satgas Penanganan Covid-19 (covid19.go.id)*  
(Diakses tanggal 15 Januari 2022)

Namun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pandemi tersebut sangat menitikberatkan upaya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Sungguh tidak mudah mengatur jumlah masyarakat yang tidak sedikit ini maka diperlukanlah pedoman dan dinamika pembaharuan kebijakan secara berkala dan memerhatikan peningkatan terus menerus, maka diberlakukannya PPKM Darurat mulai per tanggal 3-20 Juli 2021, untuk mengatasi kenaikan jumlah kasus positif yang sangat signifikan. Pemberlakuan PPKM, merujuk pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Melihat dari kasus lonjakan harian Covid-19 salah satu yang tertinggi yaitu berada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 28 Juli 2021.

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-empat dengan jumlah kasus positif baru sekitar 4.666 kasus dan jumlah kasus meninggal sebanyak 398 kasus. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah 13 diantaranya termasuk ke dalam asesmen level 4 dan 22 daerah lainnya masuk asesmen level 3. Dengan naiknya angka persebaran secara nasional tentunya mengharuskan pemerintah melakukan langkah-langkah preventif dalam pencegahan persebaran semakin luas. Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan kebijakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah. Untuk penanganan Covid-19, Pemerintah segera membentuk gugus tugas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui keputusan Walikota Nomor 180/278 tahun 2020. Berikut merupakan grafik perkembangan kasus kumulatif Covid-19 diseluruh Kota Semarang di tahun 2021.

**Gambar 1. 2**

**Grafik Perkembangan Kasus Kumulatif Covid-19 di Seluruh Kota Semarang tahun 2021**



Kota Semarang		
Provinsi Jawa Tengah		
Tanggal: 28 Juli 2021		
Tampilkan → 1 hari sebelumnya → Semua Tanggal		
• Kasus Positif Total (Terkonfirmasi)	: 30.640	• Positif per 1000 Penduduk : 17,95 ‰
• Positif Baru (1 hari)	: 320	• Meninggal per 1000 Penduduk : 1,76 ‰
• Meninggal Total	: 3.002	• Sembuh per 1000 Penduduk : 14,72 ‰
• Meninggal Baru (1 hari)	: 22	• Jumlah Penduduk : 1.706 rb
• Persentase Meninggal per Kasus (Fatality rate)	: 9,8 ‰	• Jumlah Penduduk Laki-laki : 853 rb
• Sembuh Total	: 25.116	• Jumlah Penduduk Perempuan : 853 rb
• Sembuh Baru (1 hari)	: 379	• Rasio Laki-laki : Perempuan : 100 : 100
• Persentase Sembuh per Kasus (Recovery rate)	: 82,0 ‰	• Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) : 4.566
• Masih Sakit (Dirawat/Isolasi)	: 2.522	• Luas (km2) : 373,8
		• Suspek Total : 12.078
		• Suspek Proses (Perawatan/Isolasi) : 862
		• Suspek Discarded (Selesai) : 11.216
		• Probable Proses (Perawatan/Isolasi) : -
		• Discarded : 11.216
		• Jumlah Kecamatan : 16
		• Jumlah Desa : 177
		• Jumlah Pulau Bernama : -

Sumber : [andrafarm.co.id](http://andrafarm.co.id)

(diakses tanggal 20 Januari 2022)

Melalui riset oleh Institute For Policy Development UGM, latar belakang diberlakukannya PPKM Darurat ini, karna adanya gelombang kedua Covid-19 yang ditandai dengan peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, yang diduga adanya varian baru yaitu Delta namun kenaikan kasus aktif ini juga disebabkan 2 hal yaitu; adanya peningkatan mobilitas masyarakat setelah Idul Fitri dan terdapat peningkatan mobilitas masyarakat di kawasan taman, transportasi umum dan tempat kerja yang mungkin dapat meningkatkan kerumunan. Dari data yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan Covid-19, Indonesia sedang mengalami puncak tren peningkatan jumlah kasus positif tertinggi adalah di bulan Juli, mencapai sekitar 574,447 kasus aktif atau sekitar rata-rata 16,14% per 24 Juli 2021.

Namun saat pelaksanaan intruksi dari Kemendagri dijalankan di hari pertama kerja, masih saja terdapat beberapa pelanggaran aturan yang dilakukan di masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan para karyawannya untuk bekerja di dirumah saja. Melihat dari lingkungan masyarakat di Kota Semarang yang tidak semuanya bekerja di sektor non esensial, beberapa ada yang bekerja menjadi pedagang dan petani. Pantas saja dalam perekonomian mereka sangat berdampak dan tentu saja tak dapat dielakkan, terlebih

banyak perusahaan yang akhirnya memilih untuk merumahkan sebagian pekerjanya karena menderita kerugian akibat perusahaannya tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Artinya, pandemi covid-19 yang telah terjadi merupakan *welfare emergency*, dimana darurat kesehatan akibat wabah ini juga telah mengakibatkan darurat ekonomi. Maka dari itu penanganan covid-19 dari sisi ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara harmonis dan stabil dengan beriringan berbasis hak asasi manusia. Seperti temuan yang dilakukan oleh Susanto & Asmara (2020), mendukung kebijakan PPKM yang perlu diambil dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penularan covid-19, karena baik secara ekonomi dan Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), dan tidak dicabut (*inalienable*). Dengan berpegang pada prinsip “*salus populi suprema lex esto*” keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Powell, 2006). Maka kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun penyembuhan dari covid-19 harus menjadi prioritas pertama (Arde-Acquah, 2015). Dengan demikian ketahanan fisik masyarakat akan tetap terjaga dan ketahanan ekonomi akan pulih lebih cepat.

Dalam mengembalikan ketahanan ekonomi yang runtuh di daerah Sronol Kulon tersebut, perlunya meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam usaha sekaligus untuk meningkatkan kualitas usaha agar kesejahteraan keluarga terwujud yang bersumber dari peningkatan pendapatan keluarga (Nurdewanto dan Yuniriyanti, 2015). Selama dua decade lalu memberikan banyak pelajaran bagi setiap individu untuk bisa beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang konvensional menuju tata cara hidup yang baru dengan mengembangkan beberapa inovasi dan kreativitas. Selama ini masyarakat di

wilayah Srandol Kulon menggantungkan hidup dari penghasilan mereka sebagai pedagang dan petani untuk mencukupi kehidupan mereka namun saat terjadi PPKM Darurat tak sedikit dari mereka mengharuskan untuk gulung tikar, tutup berjualan karna penjualan berkurang omsetnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat pandemi Covid-19 melanda tercatat jumlah pencari kerja sebanyak 220.763 orang dan hanya 81.835 atau 37,7% yang hanya diterima kerja, sisanya sebagai pengangguran.

Melalui desentralisasi, daerah diberikan wewenang untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan serta ketahanan ekonomi daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat. Dengan demikian daerah diharapkan mampu melakukan perencanaan dengan baik. Hal inilah yang terjadi di Kota Semarang, dengan berfokuskan kepada masyarakat yang paling berdampak yaitu para pedagang maka pemerintah Kota Semarang menginisiasi sebuah evaluasi program yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap Kesehatan dan ketahanan ekonomi bagi warga masyarakatnya, terlebih yang menjadi rujukan penelitian penulis di wilayah Kelurahan Srandol Kulon.

## **1.2 Keaslian Penelitian**

Karya ilmiah pada dasarnya ingin menawarkan kebaruan dari penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian pada evaluasi proses implementasi sudah pernah banyak dilakukan sebelumnya dan selalu mengandung kebaruan yang didapatkan dari luang lingkup penelitian, dan jawaban baru dari pertanyaan penelitian serupa obyek penelitian dengan rumusan masalah yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis mengambil topik pembahasan pada evaluasi proses implementasi kebijakan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan obyek penelitian di wilayah Kelurahan

Sronдол Kulon, dan penelitian ini terfokus terhadap ketahanan ekonomi di wilayah tersebut.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Melihat kondisi seperti latar belakang dan ruang lingkup masalah di atas sebagaimana yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan PPKM Darurat terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sronдол Kulon?
2. Apakah faktor-faktor penyebab keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut?
- 3.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Kelurahan Sronдол Kulon serta mencari tahu apa saja faktor-faktor pendorong keberhasilannya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan dan dapat memberi manfaat serta pembelajaran berupa:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan ikut memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakn dalam hal ini program PPKM darurat dalam rangka menjaga situasi kesehatan dan ketahanan ekonomi

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi guna mempelajari tentang penerapan sebuah kebijakan.

3. Menjadi refrensi bagi peneliti lain yang memiliki permasalahan yang serupa.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Spondol Kulon, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam penerapan program PPKM Darurat saat proses implementasi di lapangan.

2. Bagi Masyarakat, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat ikut menginformasikan bahwa masyarakat Kelurahan Spondol Kulon bisa ikut berpartisipasi dan mensukseskan Program PPKM Darurat dengan ikut mentaati agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah.

3. Bagi Peneliti, Penelitian ini digunakan sebagai pembandingan dengan teori evaluasi dan implementasi kebijakan yang telah ada yang disesuaikan dengan fenomena kebijakn Program PPKM Darurat di Keluhan Spondol Kulon.

### **1.6 Tinjauan Literatur**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan beberapa teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan kepustakaan dalam kajian “Implementasi Kebijakan PPKM Darurat di Kelurahan Spondol terhadap Ketahanan Ekonomi” belum ada yang mengkaji. Akan tetapi sudah ada penelitian yang relevan dengan yang penulis teliti, hanya saja obyek yang dikaji berbeda. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, antara lain:

**Table 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen	Dengan perpegang pada prinsip “ <i>salus populi suprema lex esto</i> ” (Powell, 2006)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan penelitian <i>cross sectional</i> atau OLS.	Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan PPKM berpengaruh negatif terhadap ketahanan fisik, ekonomi dan sosial-psikologis keluarga pedagang.
2.	Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Keliling di Kelurahan Kedurus Kota Surabaya		Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif melalui wawancara terstruktur.	Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan pedagang keliling saat pandemi mengalami penurunan dibanding sebelum pandemi karena tidak termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya.
3.	Lia Fitrianingrum	Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat selain melibatkan unsur organisasi, subtransi dan politis maka ada unsur yang sangat penting yang merupakan pendorong kebijakan penanganan covid ini optimal, yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat ( <i>human society</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data sekunder, observasi dan wawancara</li> </ul>

## 1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

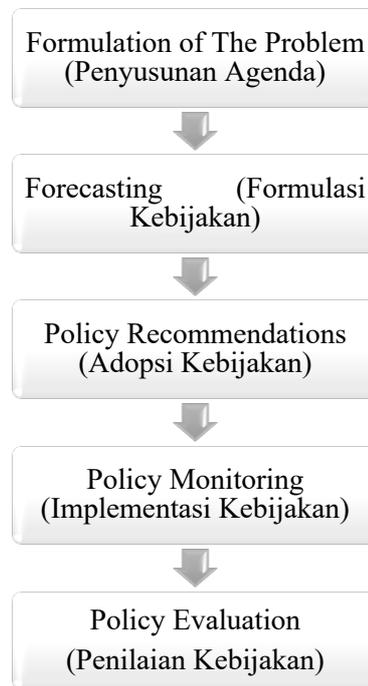
### 1.7.1 Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik menurut Budi Winarno (2007:16) telah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga istilah tersebut sudah tidak lagi asing bagi sebagian besar orang. Sebuah istilah kebijakan atau *policy* seringkali digunakan untuk merujuk kepada sikap seorang *stakeholder* baik itu pejabat atau kelompok strategis ataupun lembaga-lembaga pemerintahan yang berada pada kegiatan tertentu. Adapun Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung beberapa makna yaitu : (1) kebijakan publik tersebut hanya dibuat oleh badan pemerintahan saja bukan badan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis yang dimaksud yaitu suatu rangkaian kegiatan yang mencakup beberapa proses kebijakan publik itu sendiri yang telah dikemukakan oleh William Dunn yaitu seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 1.3**

**Proses Kebijakan dari William Dunn**



Sumber : *William N. Dunn, (1994 :17)*

William N.Dunn, (1994:17) dia menjabarkan tahapan-tahapan kebijakan publik yaitu seperti ini

**Table 1.2**

**Tahap Analisis Kebijakan**

<b>Tahapan</b>	<b>Karakteristik</b>
Perumusan Masalah :	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
<i>Forecasting</i> (Peramalan) :	Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan itu tersebut.
Rekomendasi Kebijakan :	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

Monitoring Kebijakan :	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi Kebijakan :	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Melalui semua tahap yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan peraturan-peraturan yang dilahirkan serta ditetapkan oleh badan, dan pejabat pemerintah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban bersama di masyarakat.

### **1.7.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Untuk melihat dampak dan tujuan yang diperoleh maka sebuah kebijakan harus diimplementasikan atau ditetapkan kepada masyarakat. Sejak awal, implementasi kebijakan melibatkan suatu proses rasional dan emosional yang teramat kompleks, dan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Maka tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Melalui implementasi kebijakan ini secara tidak langsung pemerintah juga turut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan dalam tahap ini pula pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk turut serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan kebijakan yang ada. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan penilaian melalui prosedur yang sesuai.

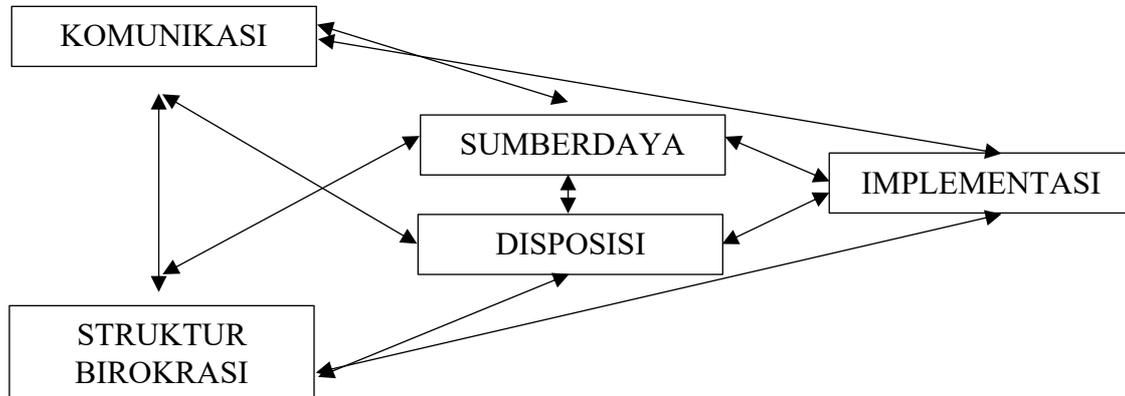
Implementasi Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas didalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu berkaitan erat dengan

kepentingan publik dan kemudian bisa diterima oleh publik. Menjadi fokus peneliti adalah melihat bagaimana tingkat kepatuhan (*compliance*) dalam sebuah implementasi proses kebijakan, karena dengan melihat kepatuhan bisa menilai bagaimana sebuah kebijakan bisa di evaluasi dengan kesimpulan gagal atau berhasil. Kepatuhan (*compliance*) disini juga melihat apakah yang diperintahkan sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, atau justru terjadi ketidakcocokan. Untuk melihat bagaimana implementasi proses kebijakan dijalankan terkait kepatuhan (*compliance*), maka peneliti mencoba melihat variabel-variabel yang bisa menjadi fokus dengan menggunakan Teori dan Model Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III, 1980:1), mengatakan bahwa implementasi kebijakan suatu proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang akan menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan, dan implementasinya juga harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Namun pandangan George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2006:150) mereka menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu : “*Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure*” menjelaskan empat faktor dimaksud yakni:

**Gambar 1. 4**

**Bagan Faktor-faktor Implementasi**



Sumber : *Edwards III, (1980: 148)*

**a. Komunikasi (*communication*)**

Dalam pandangan Edward III dalam Widodo (2010: 97) komunikasi suatu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi seperti, dimensi transmisi (*transmisi*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi Transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya sekedar disampaikan kepada pelaksana tapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi Kejelasan sangat menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka dan mengetahui

apa yang menjadi maksud, tujuan , sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

- 3) Dimensi Konsistensi adanya dimensi ini agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga tidak membingungkan berbagai pihak seperti pelaksana kebijakan, target dan pihak-pihak yang berkepentingan.

**b. Sumberdaya (*resources*)**

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengatakan bahwa sumberdaya tersebut juga meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumber daya peralatan serta sumberdaya keweangan.

- 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya ini termasuk salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”

- 2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) juga menyatakan dalam kesimpulannya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*”. Kesimpulannya adalah dengan terbatasnya suatu sumberdaya anggaran akan dapat

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan secara optimal karna keterbatasan anggaran dapat menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### 3) Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan dimudahkan dalam memberikan pelayanan dan implementasi kebijakan.

### 4) Sumberdaya Kewenangan

Dalam bagian sumberdaya, yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

## c. Sikap-sikap (*disposition*)

Sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau suatu kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan yang ada.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dalam struktur ini ada dua karakteristik birokrasi SOP (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Melihat dari ke empat faktor implementasi tersebut dipandang sangat esensial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Dari beberapa kajian terhadap berbagai model tersebut, maka penulis dapat mewacanakan model atau formula hasil dari pengembangan model implementasi kebijakan, yang juga disadari belum sepenuhnya mengakomodir substansi dari kehendak sebuah teori. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksanaannya serta lingkungan sekitar (*surrounding environment*) yang saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari sebuah perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya.

### **1.8. Metode Penelitian**

John Creswell (2016) dalam bukunya ia menyebutkan bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam Teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kinerja penelitiannya. Sedangkan menurut I Made Wiratha mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi

kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai Menyusun laporan. Berdasarkan fakta-fakta atau gejala secara ilmiah. Sedangkan menurut Nasir mengatakan bahwa metode dari penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan & menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

### **1.8.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan tipe metode ini, isi penelitian berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi dengan kondisi yang terjadi. Dengan suatu proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan adalah sebagai panduan fokus peneliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi \, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Faktor pendukung bagi keberhasilan penelitian yaitu suatu subjek informan yang tepat, subjek penelitian adalah suatu sumber dalam pengumpulan data-data relevan serta akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Subjek penelitian menurut Suharsimi (dalam

Muhamammad idrus, 2009) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini berfokus kepada informan utama yaitu pedagang yang berdampak saat adanya kebijakan PPKM Darurat di Kelurahan Srandol Kulon

### **1.8.3 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi objek lokasi penelitian yang dilakukan adalah diwilayah Kelurahan Srandol Kulon.

### **1.8.4 Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif serta wawancara dengan informan. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhadjir, 1966). Maka dalam penelitian kualitatif ini yaitu mencari informasi serta mengevaluasi terkait *impact* kebijakan PPKM Darurat terutama ke para pedagang, dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam mempertahankan ketahanan ekonominya. Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan menggunakan sumber data berupa :

#### **1.8.4.1 Data Primer**

Data primer ialah data yang mangacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Adapun sumber data primer itu sendiri adalah berupa responden individu, dan kelompok fokus. Umi Narimawati dalam bukunya mengemukakan pengertian data primer adalah “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden dan informanyaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikansebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data”. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai pedoman wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait.

#### **1.8.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder menyiratkan suatu data atau informasi yang dikumpulkan atau dicatat oleh orang lain sebelumnya. Sumber data sekunder ini sendiri berupa catatan, dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan sebagainya. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya cenderung mendukung keperluan data primer yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku, browsing bahan bacaan di internet serta dokumen-dokumen lainnya.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data yang diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupa angka-angka. Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengelola data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan bahwa adanya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datany sudah jernih.

### **1.8.6 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan penelitian dalam studi Pustaka, dokumen dan wawancara bila diperlukan untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat.

### **1.8.7 Reduksi Data**

Reduksi Data diartikan sebagai suatu proses pemilihan pemusatan perhatian pada pengabstrakan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, megarahkan maupun membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

### **1.8.8 Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono, (2010:249) dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data merupakan kegiatan menyusun kumpulan informasi yang diperoleh sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Tujuan dari penyajian data adalah melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yang ada. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, grafik, matriks, bagan dan jaringan. Bentuk tersebut menggabungkan informasi sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

### **1.8.9 Penarikan Kesimpulan**

Menurut Sugiyono (2010:253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atas suatu temuan dalam kumpulan data yang lain.